Retorik • Vol. 13(1), 2025
DOI: 10.24071/ret.v13i1.12438

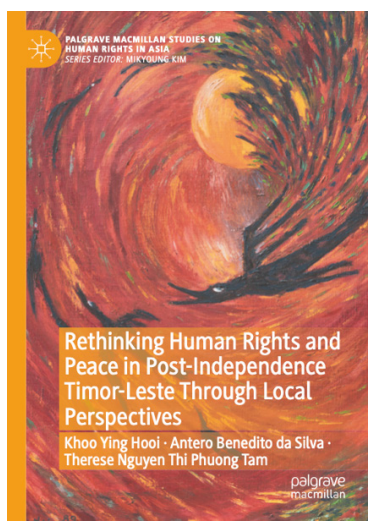
Book Review

p-ISSN: 1412-6932
e-ISSN: 2549-2225

Rethinking Human Rights and Peace in Post-Independence Timor-Leste Through Local Perspectives.

Khoo, Ying Hooi, Antero Benedito da Silva, dan Therese Nguyen Thi Phuong Tam, eds. Singapore: Palgrave Macmillan, 2022

Eventus Ombri Kaho
Magister Kajian Budaya, Universitas Sanata Dharma, Yogyakarta, Indonesia
email: matelosban@gmail.com



Membaca tulisan-tulisan yang dikumpulkan dalam buku ini membawa saya kembali pada pengalaman penuh trauma dan menyedihkan pasca-referendum Timor-Leste atau lebih tepatnya pada tahun 2000. Catatan dalam buku ini seolah membuka ingatan saya akan peristiwa nahas yang sudah saya lalui beberapa tahun silam. Kendati saya di bagian barat Timor-Leste, tetapi gejolak itu cukup membekas. Tidak mudah untuk menampik begitu saja. Pasca-referendum, Timor-Leste dihadapkan pada berbagai persoalan, khususnya dalam hak asasi manusia yang kemudian dituliskan dalam sembilan bab buku ini. Ying Hooi Khoo dan sembilan penulis lainnya berupaya memperlihatkan bagian penting pascakonflik, yakni rekonsiliasi.

Pada bagian awal, Khoo mengungkapkan bahwa ide buku ini muncul dari apa yang dilihatnya di Timor-Leste (dulu Timor Timur) sejak tahun 2016, berdasarkan obrolan santai dengan banyak orang Timor. Dalam percakapan itu, muncul pertanyaan menarik: sebenarnya, apa arti hak asasi manusia bagi orang Timor (sekarang Timor-Leste) yang sudah lama mengalami konflik berdarah saat dijajah Portugal dan diduduki Indonesia? Setelah merdeka tahun 2002 dan dibantu Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) untuk membangun

© 2025 Eventus Ombri Kaho
This article is distributed under Creative Commons Attribution License (CC BY 4.0), which permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original author and source are credited.

negara, Timor-Leste berusaha maju sendiri. Meski kaya minyak, negara ini masih termasuk salah satu negara termiskin di dunia dengan 42% penduduknya hidup di bawah garis kemiskinan. Lalu, apa arti hak asasi manusia dan perdamaian bagi orang Timor setelah merdeka?

Buku yang diedit oleh Ying Hooi Khoo, Antero Benedito da Silva, dan Therese Nguyen Thi Phuong Tam, ingin melihat hak asasi manusia dan perdamaian dari sudut pandang orang Timor-Leste. Fokus buku ini pada pentingnya pendapat orang-orang Timor-Leste dalam diskusi tentang perdamaian antara pihak luar dan masyarakat lokal di Timor-Leste. Perdamaian tidak hanya berarti tidak ada perang, tetapi juga bagaimana membangun perdamaian yang konsisten dengan melindungi hak-hak masyarakat setempat dalam proses perdamaian dan pembangunan. Selain itu, buku seri dari *Palgrave Macmillan* ini mendesak akan perlunya memenuhi kebutuhan dasar masyarakat Timor-Leste dan menciptakan sistem politik dan sosial yang bisa mendukung dan memberikan hak serta kehormatan yang lebih sesuai dengan kondisi mereka. Buku ini berusaha menggambarkan bagaimana kondisi-kondisi tersebut dibangun, dipertahankan, dan diaplikasikan.

Dalam seratus tiga puluh delapan halaman, kita diperlihatkan pada apa yang terjadi dalam konteks negosiasi di Timor-Leste. Sering kali, pihak lokal dan internasional saling bernegosiasi dan memaksakan nilai, aturan, dan budaya masing-masing. Ketika ini terjadi, terbentuklah apa yang disebut tata kelola perdamaian hibrida. Mengapa perdamaian hibrida ini perlu? *Pertama*, karena lembaga perdamaian lokal sering kali tidak memiliki dukungan kuat dari masyarakat, kekurangan uang, sumber daya, dan sulit melawan kekuasaan para pemimpin. *Kedua*, pihak internasional sering kali sulit menerima perbedaan dalam hal identitas, budaya lokal, lembaga, dan kecepatan pembangunan. Masalah *ketiga* adalah adanya banyak sistem hukum yang berbeda; dan *keempat* adalah ekonomi yang masih sederhana. Contohnya, meskipun masyarakat tahu bahwa Timor-Leste sudah merdeka, pemahaman mereka tentang isi konstitusi masih terbatas. Ini karena proses pembuatan konstitusi yang terburu-buru sehingga kurang ada waktu untuk diskusi dengan masyarakat. Selain itu, isu hak-hak perempuan dan anak juga menjadi perhatian utama di Timor-Leste, yang memiliki sistem patriarki cukup kuat sehingga menghalangi perempuan mendapatkan pekerjaan. Ada juga kekhawatiran tentang kurangnya upaya untuk mencegah dan memberikan ganti rugi atas kejahatan terhadap perempuan dan anak perempuan. Di samping itu, terdapat juga rendahnya jumlah penyelidikan, penuntutan, dan hukuman dalam kasus dugaan pemerkosaan dan pelecehan seksual, hukuman ringan untuk kekerasan dalam

rumah tangga, kegagalan mengeluarkan perintah perlindungan, dan terlalu seringnya penggunaan mediasi dalam kasus kekerasan dalam rumah tangga di sistem peradilan informal. Lebih lanjut, masyarakat Timor-Leste menyadari bahwa perdamaian bukan hanya sekadar tidak ada konflik, tetapi juga harus disertai dengan pembangunan yang berkelanjutan. Masalah utamanya adalah pembangunan sosial dan ekonomi Timor-Leste tidak sejalan dengan perkembangan demokrasi di negara tersebut.

Bagian buku ini disusun berdasarkan masalah-masalah yang sudah dibahas sebelumnya. Bagian bab 1 seperti yang telah dijelaskan oleh Ying Hooi Khoo di atas. Di bab 2, Antero Benedito da Silva menulis tentang "Keadilan Transisi: Perdebatan Soal Rekonsiliasi dan Keadilan". Antero Benedito da Silva merupakan seorang Kepala Strategi dan Keterlibatan di Oxfam di Timor-Leste. Ia pernah bekerja sebagai peneliti di La'o Hamutuk, Institut Pemantauan dan Analisis Pembangunan Timor-Leste. Pekerjaannya berfokus pada dampak lingkungan dari proyek infrastruktur besar dan tata kelola pemerintahan. Dalam tulisannya, ia melihat mengapa PBB tidak berhasil membentuk pengadilan untuk mengadili para jenderal Indonesia dan pelaku lain di luar Indonesia yang melakukan kekerasan dan kejahatan di Timor-Leste antara tahun 1975 dan 1999. Ia membahas rekonsiliasi sebagai proses politik yang rumit dan mencoba memberikan pilihan dan pandangan untuk masa depan yang baru. Pertanyaan tentang keadilan dalam proses rekonsiliasi ini menimbulkan banyak perbedaan pendapat. Ada dua jenis keadilan yang dibahas. *Pertama*, keadilan yang fokus pada hukuman individu di pengadilan. Dalam pandangan ini, orang yang melakukan kejahatan harus ditangkap dan dihukum. Keadilan berarti menghukum atau memastikan pelaku pelanggaran hak asasi manusia bertanggung jawab atas perbuatan mereka. Hukuman dianggap penting untuk menegakkan hukum internasional dan mencegah pelaku mendapatkan keuntungan dari kejahatan mereka. Namun, pengadilan internasional sulit dilakukan karena keterlibatan negara-negara besar dalam invasi Indonesia. Jenis keadilan *kedua* adalah keadilan restoratif yang berusaha mempertemukan korban dan pelaku kejahatan atau konflik untuk mencari solusi positif ke depan. Commission for Reception, Truth and Reconciliation of East Timor (CAVR) sudah merekomendasikan agar keadilan ditegakkan di Timor-Leste dan PBB seharusnya mendorong keadilan, bukan menyerahkannya kepada Timor-Leste. Karena kurangnya kemauan politik di PBB, keadilan formal mungkin tidak akan pernah terwujud bagi masyarakat Timor-Leste.

Persoalan ini kemudian dipertegas oleh Juvinal Dias, seorang Dewan Konsultatif Dana Perminyakan Timor-Leste (KKFP). Sebelumnya, ia bekerja

sebagai peneliti di La'o Hamutuk sama seperti Antero Benedito da Silva. Dalam bab 3 yang berjudul "Impunitas atas Pelanggaran Hak Asasi Manusia dan Akibatnya di Timor-Leste", Dias melihat berbagai kasus pelanggaran hak asasi manusia setelah Timor-Leste merdeka. Dia menghubungkannya dengan beberapa penyebab, seperti tidak adanya hukuman untuk kejahatan di masa lalu dan kegagalan pengadilan internasional untuk mengadili para pelaku. Setelah merdeka, Timor-Leste setidaknya sudah mengadakan lima kali pemilihan parlemen dan presiden. Pemilihan pertama diadakan pada tahun 2001 yang diatur oleh PBB, dan Frente Revolucionária de Timor-Leste Independente (FRETILIN) menang dengan suara terbanyak di parlemen. Laporan pemantauan saat itu menunjukkan kampanye partai politik berjalan lancar dan damai. Hal ini berbeda dengan pemilihan tahun 2007, di mana dilaporkan ada kekerasan dan pelanggaran hukum selama kampanye hingga pengumuman hasil. Ini sebagian besar disebabkan oleh ketegangan politik sejak tahun 2006, ketika Gusmão berbeda pendapat dengan Alkatiri dalam beberapa hal, ditambah ketidakpuasan karena pembagian wilayah Timor-Tengah. Dampak perselisihan politik di antara para pemimpin lama masih terasa pada pemilihan berikutnya. Hingga kini, tidak adanya hukuman untuk kejahatan perang masih menjadi masalah besar dalam membentuk karakter politik dan masyarakat Timor-Leste. Krisis politik tahun 2002 dan 2006, operasi militer dan polisi di Baucau, kekerasan polisi terhadap warga sipil, dan pembatasan kebebasan berpendapat adalah contoh pelanggaran hak asasi manusia yang terjadi setelah kemerdekaan.

Membaca arah politik dalam negeri Timor-Leste yang cukup kompleks membawa Fernando A.T. Ximenes untuk melihat kembali wacana dan konsensus terkait demokrasi di Timor-Leste (bab 4). Ximenes adalah seorang peneliti di Pusat Perdamaian, Fakultas Ilmu Sosial, UNTL (Universidade Nacional Timor Lorosa'e) yang sekaligus merupakan koordinator CO25 (Comité Orientador). Ia membahas bagaimana perubahan situasi dunia memengaruhi perkembangan demokrasi, cara bicara tentang hak asasi manusia, dan praktik hak asasi manusia di negara yang tergolong masih muda ini. Banyak orang melihat Timor-Leste menjalankan demokrasi berdasarkan konstitusi dengan pemilihan umum dan perwakilan rakyat.[1] Para politisi di Timor-Leste yang berpandangan demokratis atau realistis menganggap demokrasi sebagai cara sekaligus tujuan. Demokrasi menjadi hal yang penting dan dibanggakan dalam politik dan kehidupan masyarakat Timor-Leste, bahkan nama jalan pun

[1] Aurel Croissant dan Philip Lorenz, *Comparative Politics of Southeast Asia: An Introduction to Governments and Political Regimes* (Cham: Springer, 2017).

menggunakan slogan, simbol, dan tokoh yang mendukung demokrasi dan hak asasi manusia. Program televisi dan radio pemerintah, termasuk radio komunitas, juga menyebarkan ide-ide ini. Ada banyak kelompok masyarakat biasa dan organisasi non-pemerintah (LSM) yang bergerak di bidang ini sejak kemerdekaan.

Merujuk pada bab-bab sebelumnya, rasanya seperti tidak ada akhir dari persoalan hak asasi manusia di Timor-Leste. Pada bab 5 dengan judul "Provedoria Dos Direitos Humanos e Justiça (PDHJ): Antara Semangat Hak Asasi Manusia dan Keterbatasan", Ying Hooi Khoo dan Horacio de Almeida membahas peran PDHJ yang dibentuk berdasarkan Pasal 27 Konstitusi. Perlu diketahui bahwa Ying Hooi Khoo dan Horacio de Almeida merupakan dua peneliti dengan latar belakang yang sangat berbeda. Ying Hooi Khoo adalah seorang akademisi (dosen) pada University of Malaya, khususnya pada Fakultas Seni dan Ilmu Sosial. Ia juga aktif dalam berbagai karya yang terkait dengan hak asasi manusia dan demokrasi di kawasan Asia Tenggara. Sedangkan Horacio de Almeida adalah mantan wakil Ombudsman di Provedoria Dos Direitos Humanos e Justiça (PDHJ). Ia juga terlibat dalam proses kemerdekaan Timor-Leste, misalnya ikut dalam Perlawanan Nasional Mahasiswa Timor Timur (RENETIL), Kementerian Luar Negeri dan Kerja Sama, Kementerian Kesehatan, dan CAVR. Mereka memperlihatkan tantangan dan kesempatan yang dihadapi PDHJ dalam menangani berbagai masalah hak asasi manusia. PDHJ memainkan perannya secara aktif untuk memajukan dan melindungi hak asasi manusia dan tata pemerintahan yang baik. PDHJ telah menjalin hubungan kerja dengan NHRI Asia Tenggara lainnya seperti Komnas HAM. Sejak pemulihan kemerdekaan Timor-Leste, banyak anak-anak Timor yang diculik (yang kemudian mengambil nama baru dan mengadopsi budaya, bahasa, dan agama dari rumah baru mereka) dipulangkan, dengan bantuan CSO dari kedua negara.

Namun, ada pertanyaan apakah lembaga hak asasi manusia yang didukung pemerintah ini bisa benar-benar efektif melindungi hak asasi manusia. Seperti yang dikatakan Silverio dalam wawancara dengan Forum Asia Pasifik (2015), "kerja hak asasi manusia bukan hanya tentang memperbaiki pelanggaran, tetapi juga mengubah pandangan orang." Salah satu masalah utama yang masih ada adalah tingkat pendidikan yang rendah, yang berkaitan erat dengan kesadaran akan hak asasi manusia. Jika kesadaran meningkat, kemungkinan orang akan lebih banyak menuntut dan meminta perlindungan hak asasi manusia. Selain itu, peran pemimpin juga penting. Banyak lembaga hak asasi manusia yang berhasil karena memiliki komisioner yang mandiri

dan berdedikasi, sementara yang lain kesulitan karena pemimpin yang kurang aktif.

Lebih lanjut, Jose Cornelio Guterres dalam bab 6 mencoba melihat sistem politik Timor-Leste yang belum stabil karena dipimpin oleh orang-orang yang kurang berpengalaman. Guterres yang adalah seorang Presiden Eksekutif Institut Nasional untuk Sains dan Teknologi (INCT) sekaligus dosen Filsafat Budaya di UNTL, menghubungkan hal ini dengan kesulitan dalam memenuhi kebutuhan dasar masyarakat. Ia melihat faktor pribadi, sejarah, dan ekonomi untuk menjelaskan mengapa politik di sana tidak pasti dan bagaimana hal ini memengaruhi kesejahteraan masyarakat. Sebagai negara baru, Timor-Leste sedang membangun sektor politik, ekonomi, dan sosialnya. Pemerintah memiliki rencana yang disebut Timor-Leste's Strategic Development Plan (TLSDP) untuk menjadikan masyarakat berpenghasilan menengah lebih aktif dalam politik dan ikut mengambil keputusan melalui pemilu, perencanaan proyek, dan pembuatan undang-undang pada tahun 2030.

Rencana jangka panjang Timor-Leste dalam memajukan kehidupan masyarakat, baik di sektor ekonomi, politik, dan sosialnya, memperlihatkan sebuah harapan baru. Sekilas memang sangat fundamental. Namun, di satu sisi ada hal lain yang pada saat yang sama dibiarkan terus terjadi, yakni pembatasan pada hak-hak perempuan. Eugenia Correia dalam tulisannya berjudul "Patriarki dan Hak-Hak Perempuan di Timor-Leste" (bab 7) meneliti sistem patriarki dan masalah utama yang memengaruhi hak-hak perempuan. Correia melihat bagaimana hak-hak perempuan dibatasi, seperti sulitnya memiliki tanah dan warisan, dan bagaimana mereka diam-diam menderita kekerasan berbasis gender/*Gender-Based Violence* (GBV) dan kekerasan sosial karena tergantung pada penghasilan dari laki-laki, terutama di desa dan daerah terpencil. Ia juga membahas faktor-faktor penghambat, seperti kurangnya aturan hukum yang memadai, dan memberikan saran untuk mengatasi masalah ini. Timor-Leste dianggap negara demokrasi, tetapi sistem patriarki masih kuat meskipun Konstitusi Pasal 16 ayat 2 menyatakan bahwa tidak boleh ada diskriminasi berdasarkan warna kulit, ras, status pernikahan, jenis kelamin, asal etnis, bahasa, status sosial atau ekonomi, keyakinan politik atau ideologi, agama, pendidikan, dan kondisi fisik atau mental. Pada Desember 2002, Timor-Leste menyetujui Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women (CEDAW), perjanjian internasional yang mewajibkan negara untuk mengambil langkah-langkah memajukan perempuan di semua tingkatan. Pada tahun 2010, pemerintah juga menyatakan kekerasan dalam rumah tangga sebagai kejahatan publik, meskipun ini saja tidak cukup untuk

mengubah pandangan tentang posisi perempuan dalam keluarga, masyarakat, dan negara. Walaupun ada kemajuan sejak tahun 2001 untuk meningkatkan kesetaraan gender dan memastikan hak-hak perempuan dan anak perempuan, masih ada hambatan. Kendati ada aturan dan kebijakan untuk mempromosikan kesetaraan gender dan hak asasi manusia, masalah seperti kekerasan, kurangnya kemampuan, dan keengganan untuk melibatkan semua orang masih menjadi penghalang di Timor-Leste. Perlu diketahui bahwa Eugenia Urania da Costa Correia adalah Direktur Eksekutif CO25. Ia telah membantu CSO dan lembaga lainnya memahami perkembangan CSO di Timor-Leste.

Selain budaya patriarki yang cukup dominan, juga terdapat beberapa faktor yang memengaruhi kehidupan lanjut usia seperti yang dituliskan oleh Therese Nguyen Thi Phuong Tam. Sebagai seorang dosen dan peneliti yang fokus pada isu terkait perempuan, gender, dan pembangunan, Therese Nguyen Thi Phuong Tam melihat bahwa orang tua (lanjut usia), terutama perempuan, tidak diperhatikan dan diperlakukan buruk di beberapa daerah di Timor-Leste, seperti Baucau, Viqueque, Maliana, Ermera, dan Suai. Hal ini kemudian dirumuskan dalam tulisannya yang berjudul "Hak-Hak Perempuan Lanjut Usia yang Terabaikan di Timor-Leste" (bab 8). Nguyen memberikan contoh dari kisah nyata tentang kesulitan yang dialami empat perempuan lanjut usia. Di Timor-Leste, masalah penelantaran dan kekerasan terhadap orang tua sering dianggap sebagai urusan pribadi keluarga dan tidak dibicarakan di masyarakat. Pelanggaran hak asasi manusia ini jarang muncul dalam diskusi publik atau laporan hak asasi manusia dari organisasi masyarakat sipil dan pemerintah.

Ada banyak alasan mengapa orang tua ditelantarkan dan dianiaya. Dalam konteks Timor-Leste, dua alasan utama adalah *kemiskinan* dan kurangnya *pendidikan*. Perempuan lanjut usia yang menjadi korban dalam penelitian ini tidak memiliki uang dan pendidikan yang cukup, dan orang yang merawat mereka juga miskin. Di Timor-Leste, masalah ini masih dianggap tabu, sehingga tidak dianggap penting oleh masyarakat dan pemerintah. Meskipun pemerintah sudah memberikan bantuan uang, pelaksanaannya sulit. Hal ini menjadi salah satu alasan mengapa orang tua masih dianiaya oleh keluarga atau kerabat, terutama perempuan lanjut usia yang sendiri dan mudah ditipu. Kekuatan yang tidak seimbang juga menjadi masalah, di mana semakin tua seseorang, semakin lemah, rentan, dan bergantung pada yang orang lain. Selain itu, pengasuh keluarga mungkin kurang terampil karena pendidikan yang rendah. Dalam keluarga yang mengikuti garis keturunan laki-laki, menantu perempuan biasanya menjadi pengasuh utama dan mungkin tidak merasa me-

miliki tanggung jawab sebesar anak kandung. Orang tua yang lanjut usia sering memilih diam atau terlalu lemah untuk melawan perlakuan buruk.

Setelah tahun 2002, pelembagaan perdamaian liberal telah menghadapi tantangan yang signifikan di Timor-Leste, khususnya berkenaan dengan isu-isu pembangunan. Meskipun Timor-Leste memiliki kerangka hukum yang komprehensif untuk perlindungan lingkungan, Rencana Pembangunan Strategis 2011-2030, Timor-Leste's Strategic Development Plan (TLSDP), justru mengedepankan proyek-proyek infrastruktur skala besar yang berpotensi merusak lingkungan serta mengancam kehidupan dan penghidupan masyarakat lokal, terutama kelompok rentan dan mereka yang tinggal di sekitar lokasi proyek. Pada bab kesembilan ini, Adilsonio Da Costa Junior, Kepala Strategi dan Keterlibatan di Oxfam di Timor-Leste, mengkritik bagaimana pelaksanaan proyek pemerintah dan swasta sering melanggar aturan lingkungan yang ada, sehingga melemahkan penegakan hukum. Hal ini sejalan dengan pekerjaannya yang berfokus pada dampak lingkungan dari proyek infrastruktur besar dan tata kelola pemerintahan.

Daftar Pustaka

Croissant, Aurel, dan Philip Lorenz. *Comparative Politics of Southeast Asia: An Introduction to Governments and Political Regimes*. Cham: Springer, 2017.